

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum hak-hak saksi dalam sistem peradilan pidana. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang. Adapun Isu hukum yang dibahas dalam penelitian normative ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak-hak saksi dalam sistem peradilan pidana? 2) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang?.. Dengan isu hukum dan tujuan penelitian tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemberian perlindungan hak-hak saksi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum efektif, karena pada Pasal 5 ayat (2) menjelaskan tentang hak yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan pada saksi dalam kasus tindak pidana tertentu, yang mana tidak semua saksi mendapatkan perlindungan dan hak yang sama. 2) Dengan adanya kelemahan-kelemahan dalam ini diharapkan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan saksi sekarang ini, peninjauan terhadap kelebihan sistem di negara-negara maju mengenai perlindungan saksi dapat menjadi masukan positif ke dalam praktik perlindungan saksi di Indonesia. Rekomendasi diberikan 1) Perlu adanya prosedur yang terukur dalam pemberian hak-hak saksi, baik untuk saksi tindak pidana biasa maupun saksi tindak pidana yang dianggap mengancam jiwa, untuk mengatasi ketimpangan pemberian hak-hak saksi yang diatur dalam Undang-Undang ini agar memberikan hak yang sama bagi seluruh saksi untuk semua jenis tindak pidana yang ada. 2) Kepada pembuat aturan perundang-undangan perlu melakukan revisi atau perubahan-perubahan dalam Undang-Undang perlindungan saksi, agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam Undang-Undang perlindungan saksi, agar Undang-Undang ini dapat berjalan dengan efektif sebagai pemberi perlindungan hukum terhadap saksi dari intimidasi dan ancaman pihak lain.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Sistem Peradilan Pidana**

## **ABSTRACT**

The purpose of the study is 1)To find out the legal protection arrangements for witnesses rights in the criminal justice system 2)To find out and analyze the arrangements for effective legal protection of witness rights in the Indonesian criminal justice system in the future. The legal issue discussed in normative study is: 1)How to regulate the legal protection of witness rights in the criminal justice system? 2)How to regulate effective legal protection for witness rights in the Indonesian criminal justice system in the future?. With legal issues and the objectives of the study, the research method used is normative juridical research with a statutory approach, conceptual approach, case approach and comparative approach. Legal materials used are: primary law material, secondary law material, and tertiary material. Analysis of the collected legal material was done by inventory, systemization, and interpreting research points out that 1)Was granted to safeguard the rights of witnesses set out regulated in Article 5 paragraph (1) the law on the protection of witnesses and victims has not been effective, because in the article 5 paragraph (2) explains the right referred to in article 5 of this passage (1) as given to witnesses in certain criminal cases where not all witnesses have equal protection and rights 2)Given the weaknesses in this law it is hoped that changes to the witness protection law will be made, currently a review of the advantages of the system in developed countries regarding witness protection can be a positive input into witness protection practices in Indonesia. Recommendation are given: 1)It is necessary to have a measurable procedure in granting witness of ordinary crimes and witnesses to crime considered life threatening, to overcome the inequality of granting witness rights as regulated in this law in order to provide equal rights for all witnesses to all types of criminal acts. 2)To the legislators of witness protection in order to overcome the weaknesses found in this law, so that this law can run effectively as a legal protection provider for witnesses from intimidation and threats from other parties.

**Keywords: Legal protection, Witnesses, and Criminal justice system**